Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan belahan dunia. Bisnis kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian baru dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bisnis perkebunan. Untuk kebutuhan bahan baku industri baik industri dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sektor perkebunan hingga saat ini merupakan salah satu penunjang perekonomian daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Mata pencaharian penduduk Kalimantan Barat sebagiannya adalah usaha kelapa sawit yang berfungsi sebagai penghasilan nilai tambah atau penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk.

Meningkatnya bisnis kelapa sawit didukung juga oleh perkembangan teknologi dan sistem yang mempermudah dan mempercepat dalam penyusunan data dan laporan keuangan perusahaan. Banyaknya kegiatan usaha di berbagai macam sektor ekonomi yang menggunakan software Sistem Akuntansi Keuangan Kebun (SAKK). Salah satu perusahaan yang menggunakan software Sistem Akuntansi Keuangan Kebun adalah PT.Mulia Bhakti Kahuripan (Makin Group).

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

Dalam penyusunan laporan keuangan perkebunan PT.Mulia Bhakti Kahuripan menggunakan sistem, dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada akhir periode yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk pengembangan usaha dan penanaman modal.

Menurut Wild & Kwok (2011: 4-7) dalam Agoes dan Trisnawati, (2013: 1-3) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Siklus akuntasi dilakukan mulai dari menganalisa transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal, mencatat akun-akun, termasuk debit dan kredit dalam jurnal, mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke buku besar, meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah, mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening *up to date,* menjurnal dan *posting* penyesuaian, menyesuaikan akun buku besar dan jumlah, menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan, menjurnal dan *posting entry* untuk menutup akun sementara, tes keakuratan dari prosedur penutupan, dan jurnal pembalik dalam periode berikutnya.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

Menurut Prof.Mr.W.I.P.A.Molengraff dalam Silondae, dan Ilyas, (2011:29) pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

PT. Mulia Bhakti Kahuripan (Makin Group) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang agro dimana salah satu jenis usahanya adalah industri perkebunan kelapa sawit. Salah satu faktor kunci keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal didukung dengan pemanfaatan teknologi. Dengan adanya PT. Mulia Bhakti Kahuripan (Makin Group) masyarakat setempat mendapatkan lapangan pekerjaan baru. MAKIN Group menuntut adanya karyawan perusahaan yang mampu memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan visi dan misi perusahaan kedepan menuju *word class company* dengan kinerja prima dan tata kelola yang baik.

Mengingat sangat terbatasnya tenaga profesional siap pakai di luar perusahaan dan beratnya memberdayakan sumber daya manusia, MAKIN Group menyadari bahwa tenaga kerja profesional tidak hanya dibutuhkan pada masa sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, MAKIN Group merasa perlu mempersiapkan sendiri tenaga kerja profesional perkebunan berkarakter kuat dan berkompetensi tinggi yang berasal dari karyawan perusahaan maupun dari luar perusahaan yang akan dikumpulkan dan di latih dengan program pelatihan yang terintegrasi di Pusat Pelatihan Perkebunan MAKIN Group yang berada dibeberapa kebun diseluruh cabang anak perusahan PT. MAKIN Group.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya (http://ekonomi.kompasiana.com). Setiap perusahaan perlu adanya pembayaran pajak yang di atur oleh pemerintah. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Waluyo(2011:2)).

Menurut Kementrian Keuangan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 1, PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang wajib membayar:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen (Pasal 4 ayat 1g); bunga (Pasal 4 ayat 1f); royalty; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang di potong PPh 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21. Pemotongan PPh 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong (Waluyo,2013).

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

Perhitungan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:
   a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PAAT) kecuali Pejabat Pembnuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
   b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa (Waluyo(2011:284)).

   Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang terima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau perwaklian perusahaan luar negeri lainnya. (Waluyo(2011:283)).

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

Subjek pajak atau penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hokum pengenaan Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan (Waluyo(2011:283)).

Secara umum, mekanisme pemotongan/pemungutan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan/pemungut pajak memotong/memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tariff yang ditentukan;
2. Pemotongan/pungutan pajak menyetor dan melaporkan pelaksanaan pemotongan /pemungutan pajak ini dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Catatan: SPT MAsa Pasal 22 ada sejak bulan Agustus 2004;
3. Bagi WP yang dipotong/dipungut pajaknya, nilsi tersebut merupakan cicilan pajak yang terutang (kredit pajak) pada akhir tahun apabila atas penghasilanya dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17 UU PPh).
4. Untuk WP yang atas penghasilanya dikenakan PPh yang bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang (Murtopo, Sjafardamsah dan Binsarjono, 2011).

Objek pajak pertambahan nilai, dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, dan penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

b. Barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.

c. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor barang kena pajak, dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak pada butir 1 di atas, siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam daerag pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak tetap dikenai pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha, penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.

   b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.

   c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak dimaksud meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, untuk dapat memberikan perlakuan pengeanaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak, maka atas barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean juga dikenakan pajak pertambahan nilai.

5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terhadap jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam daerah pabean dikenakan PPN.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, berbeda bila dibandingkan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan seperti pada angka 1 dan angka 3, terhadap pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak .
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan seperti pada kegiatan ekspor barang kena pajak berwujud, terhadap pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Termasuk dalam kategori barang kena pajak tidak berwujud antara lain:
    a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusatraan, kesenian atau hanya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
    b. Penggunaan atau hak menggunakan peralata/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Batasan kegiatan dari jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Mentri Keuangan (Waluyo (2012:302)).

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Hal-hal yang bersifat teoritis dirasakan di dunia perkuliahan. Kondisi yang berbeda dapat dirasakan ketika dipraktekan dalam dunia kerja. Dunia perkuliahan tidaklah cukup untuk membekali saya untuk menghadapi dunia kerja. Oleh sebab itu, saya melaksanakan kerja magang di PT. Mulia Bhakti Kahuripan (Makin *Group*) antara lain:

1. Untuk memenuhi kewajiban mata kuliah magang.
2. Untuk mengetahui proses mengolah data yang menggunakan software SAKK.
3. Untuk mengetahui membuat faktur penjualan kelapa sawit.
4. Untuk mengaplikasikan kemampuan praktek yang diperoleh di perkuliahan ke dunia pekerjaan.
5. Untuk mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya dalam perusahaan.
6. Untuk memperoleh pengalaman bekerja di perusahaan.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 sampai 6 September 2014 di PT. Mulia Bhakti Kahuripan (Makin *Group*) bagian *officer accounting*. Waktu kerja selama magang, yaitu Senin hingga Jumat mulai pukul 07.00-16.30, dan Sabtu pukul 07.00-12.00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.2.1 Tahapan Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah:

1. Pencarian perusahaan sebagai tempat praktek kerja magang.
2. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi.
3. Melampirkan *CV* dan *Application Form*.
4. Mengikuti proses *interview*.
5. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
6. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditunjuk kepada Koordinator Magang.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

7. Pemberian surat pengantar magang ke perusahaan tempat praktek kerja magang.
8. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.
9. Pelaksanaan Kerja Magang.
10. Ketua Program Studi menunjuk seseorang dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, sebagai pembimbing kerja magang.
11. Penyusunan laporan kerja magang dan mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbing laporan magang setelah menyelesaikan kerja magang.

1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah:

1. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika ada yang tidak mengikuti perkuliahan tanpa alasan, akan dikenakan pinalti dan tidak diperboleh mengikuti praktek kerja magang pada periode berjalan
2. Pada pembekalan kerja magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penilisan laporan kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur Kerja Magang, perilaku dan cara berkomunikasi dalam perusahaan.

Pertemuan2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data, analisa kelemahan dan keunggulan.

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi serta Tanya jawab.

3. Melakukan pembekalan teknis dengan dosen pembimbing. Kerja magang dilaksanakan di perusahaan di bawah bimbingan karyawan tetap di perusahaan tersebut.
4. Diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan tempat pelaksanaan kerja magang.
5. Bekerja minimal disatu bagian tertentu diperusahaan sesuai dengan bidang studi.
6. Pembimbing magang memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa bimbingannya.
7. Koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014

1.3.2.3 Tahap Akhir

Prosedur akhir kerja magang adalah:

1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalani selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
3. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum laporan diajukan untuk permohonan ujian kerja magang.
4. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang.
5. Pembimbimg lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
6. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan untuk disampaikan kepada koordinator magang.
7. Setelah persyaratan ujian kerja magang lengkap, koordinator kerja magang menjadwal ujian kerja magang.
8. Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung jawabkan laporanny.

Pelaksanaan accounting..., Erni, FB UMN, 2014